

Pemberian surat keterangan kematian, dan Pemberian surat keterangan cuti bersalin.

2. **Pelayanan kesehatan anak dengan ruang lingkup : Pelayanan bayi baru lahir, Pelayanan bayi, Pelayanan anak balita, Pelayanan anak pra sekolah. Kewenangan yang dimiliki adalah : Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat, Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk, Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan, Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah, Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah, Pemberian konseling dan penyuluhan, Pemberian surat keterangan kelahiran, dan Pemberian surat keterangan kematian.**
3. **Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan : Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom.**

Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus bagi bidan yang menjalankan program Pemerintah mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi :

1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit.
2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu (dilakukan di bawah supervisi dokter).
3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan
4. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan.
5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah.
6. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas.
7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya.
8. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah.

Khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah mendapat pelatihan untuk pelayanan tersebut.

Kapan *human life* dimulai? Hal ini perlu sekali dijelaskan. Apakah hidup manusia itu dimulai sejak terjadi pembuahan sehingga setiap bentuk pencegahan kehamilan hanya di izinkan sebelum terjadinya pembuahan atau apakah hidup manusia dimulai sejak janin diberi ruh oleh Allah SWT sehingga pengguguran atau pencegahan kelahiran masih di izinkan sebelum janin bernyawa?

Musyawarah Ulama Terbatas mengenai KB dipandang dari segi hukum syari'at Islam pada tanggal 26-29 Juni 1972 memutuskan antara lain bahwa: "Pemakaian IUD dan sejenisnya tidak dapat dibenarkan selama masih ada obat-obat dan alat-alat lain, karena untuk pemasangan/ pengontrolannya harus dilakukan dengan melihat aurat besar wanita; hal ini diharamkan oleh Syari'at Islam, kecuali dalam keadaan darurat". Kemudian Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan pada tanggal 17-20 Oktober 1983 memutuskan antara lain bahwa, "Penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) dalam pelaksanaan KB dapat dibenarkan, jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis wanita, atau jika terpaksa dapat dilakukan Oleh tenaga medis pria didampingi oleh suami atau wanita lain." Namun kedua keputusan itu tidak disertai dengan dalil-dalil syar'i secara rinci.

Perubahan fatwa hukum suatu masalah memang bisa dimungkinkan, karena illat hukum yang menjadi alasan hukum ijtihad itu telah berubah, atau

